

ANALISIS FAKTOR NON-EKONOMIS DAN PENGARUHNYA TERHADAP GEJOLAK PEREKONOMIAN DI ASIA DAN ASIA TENGGARA

Oleh : Tri Widodo W. Utomo

Pendahuluan

Sebagaimana diketahui, pada penghujung abad 20 ini negara-negara di Asia pada umumnya dan di Asia Tenggara pada khususnya mengalami goncangan dan atau gejolak perekonomian – terutama pada sektor moneter – yang cukup serius. Basis ekonomi makro yang lemah ditambah dengan ulah segelintir spekulan yang mencari keuntungan pribadi, telah menyebabkan krisis tersebut semakin serius.

Bagaimanapun keadaannya, kondisi ini secara keseluruhan jelas membawa dampak yang sangat merugikan bagi negara yang bersangkutan. *Kedalam*, gejolak tadi menyebabkan terhambatnya berbagai program pembangunan, disamping menimbulkan eksese-eksese negatif lain seperti melonjaknya harga-harga kebutuhan pokok, pengurangan subsidi berbagai sektor, serta peningkatan pengangguran yang seringkali diiringi oleh aksi-aksi protes maupun kerusuhan. Sementara *keluar*, kondisi tadi mengakibatkan ketergantungan kepada negara donor semakin kuat dan seringkali juga menjebak negara tersebut kedalam perangkap hutang yang kronis. Ini belum termasuk kepercayaan dari para investor luar negeri yang menjadi ragu-ragu untuk mengembangkan usahanya.

Mengingat sangat krusialnya masalah ini, tidak mengherankan jika pemerintah negara yang bersangkutan menempuh berbagai langkah antisipatif maupun kuratif untuk menanggulangi gejolak tersebut. Secara umum, strategi yang dilakukan adalah dengan menjalin kerjasama dengan IMF dan atau negara-negara tetangga yang tidak terkena gejolak, guna memperoleh bantuan dana.

Akan tetapi secara kasuistis, setiap negara mempunyai caranya masing-masing. Malaysia misalnya, telah diambil kebijakan untuk memotong

atau mengurangi gaji (baca : penghasilan) pegawai negeri. Sedangkan Korea Selatan lebih mengandalkan kepada kesadaran masyarakat dalam bentuk sumbangan emas kepada negara. Adapun Indonesia telah menempuh kebijakan likuidasi bank-bank swasta dan penggabungan (merger) bank pemerintah, disamping juga menggalakkan Gerakan Cinta Rupiah (GETAR).

Dari sedikit uraian diatas dapat dipahami bahwa terjadinya krisis moneter negara Asia umumnya dan Asia Tenggara khususnya beserta faktor penyebab dan dampak-dampaknya, berlaku disekitar *aspek ekonomis*. Padahal jika dipahami lebih lanjut, ternyata faktor-faktor non ekonomis seperti aspek politis, sosiologis maupun kultural (budaya) masyarakat, memiliki kontribusi yang tidak kecil dan tidak dapat diabaikan.

Sehubungan dengan hal tersebut, makalah singkat ini mencoba menganalisis pengaruh beberapa faktor non ekonomis tadi terhadap krisis perekonomian yang sedang berlangsung. Namun sebelum sampai kepada analisis tersebut, terlebih dahulu akan dikemukakan sedikit tentang kinerja pembangunan negara Asia (khususnya kawasan Asia Tenggara), serta diakhiri dengan catatan penutup.

Kinerja Pembangunan Negara Asia & Asia Tenggara

Pertumbuhan perekonomian negara-negara Asia Pasifik maupun Asia Tenggara pada dekade 1980-an dan sesudahnya dapat dikatakan cukup menggembirakan diantara resesi yang melanda sebagian dunia serta kesulitan-kesulitan ekonomi lainnya (**Wong**, 1982 : 9). Hal ini dapat disimak dari tingkat angka pertumbuhan ekonomi yang rata-rata mencapai 6-7 % per tahun. Ditambah lagi dengan stabilitas politik yang cukup mantap serta potensi pasar yang sangat luas, menjadikan kawasan ini sebagai tempat ideal untuk menanamkan modal.

Dengan berbagai prakondisi yang memungkinkan kawasan ini untuk terus berkembang, terjadilah proses modernisasi dan industrialisasi secara besar-besaran, sehingga tidaklah mengherankan jika dari kawasan ini lahir negara-negara industri baru (NIC's) atau yang sering disebut dengan "Macan Asia" (Taiwan, Hongkong, Singapura dan Korea). Diluar kelompok ini masih

terdapat negara yang dikategorikan sebagai “Macan Kecil Asia” yang kinerja pambangunanannya mendapat julukan sangat istimewa (*miracle*) dari Bank Dunia, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Cina.

Namun dari proses pembangunan yang sangat pesat tadi ternyata terkandung “bom waktu” yang satu ketika dapat mengancam proses pembangunan itu sendiri. Sebagai contoh, karena terlalu memacu pertumbuhan industri, tanpa disadari negara-negara tersebut melupakan basis atau struktur dasarnya sebagai negara agraris. Padahal, produk-produk agraris inilah yang sesungguhnya merupakan *comparative advantage* dan yang harus dikembangkan menjadi *competitive advantage* bagi negara bersangkutan. Sementara itu, industri yang di-kembangkan belum menyentuh tahap *hi-tech*, melainkan masih berkuat disekitar *middle tech*. Akibatnya, kebijakan untuk mewujudkan “industri yang maju dan ditunjang oleh pertanian yang tangguh” menjadi berjalan setengah hati. Dengan kata lain, kedua sektor ini tidak mampu memberikan kontribusi secara maksimal bagi perekonomian negara bersangkutan. Sebagai contoh, industri pertanian Indonesia belum mampu memenuhi sendiri (swasembada) kebutuhan dalam negeri, sedang dipihak lain industri strategisnya (misalnya pesawat terbang) masih jauh dibawah kualitas negara maju.

Disamping itu, industrialisasi negara-negara Asia khususnya Asia Tenggara ternyata mengantarkan negara-negara tersebut dalam beberapa jebakan (Wong, 1982 : 9-11). Jebakan pertama menyangkut masalah *kuota*. Artinya, sebagai penghasil bahan-bahan mentah, ketergantungan ASEAN pada pasaran dunia sangat terasa, sehingga kegoncangan harga dipasar dunia akan sangat mempengaruhi perekonomian ASEAN. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa perekonomian negara-negara ASEAN sangat berkiblat ke Jepang dan Amerika Serikat, sehingga gerakan-gerakan atau gesekan dalam perekonomian kedua negara raksasa ini secara langsung akan menggoyangkan perekonomian dalam negara-negara ASEAN.

Jebakan lainnya adalah bahwa dalam kebijaksanaan industrialisasinya, negara-negara ASEAN menganut strategi substitusi barang impor yang akhirnya memberikan beban bagi perkembangan perekonomian mereka sendiri. Hal ini menyebabkan daya saing produk negara ASEAN tidak dapat mengimbangi produk dari negara lain yang lebih bermutu.

Dalam konteks seperti inilah perlunya penyatuan kebijakan dan kerjasama internal tingkat ASEAN. Malah tidak berlebihan jika dikatakan bahwa untuk memperkuat daya saing regional, perlu diciptakan integrasi berbagai instrumen perekonomian, misalnya dalam bentuk penyatuan mata uang, penghilangan berbagai hambatan tarif dan non tarif, dan sebagainya.

Dari sedikit uraian diatas dapat disimak bahwa kinerja perekonomian di kawasan Asia Pasifik dan Asia Tenggara belum begitu mantap. Artinya, pada periode tertentu mengalami pertumbuhan yang amat pesat, sementara pada periode berikutnya mengalami pelambatan yang cukup berat. Oleh karena itu, strategi kebijakan pembangunan nasional masing-masing negara perlu direncanakan secara jangka panjang, dalam pengertian tidak mengejar pertumbuhan tinggi atau *profitability* secara sesaat, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek pemerataan (*equity*) dan keberlangsungan (*continuity*) ke masa depan.

Faktor-Faktor Non Ekonomis Penyebab Munculnya Krisis

Diatas telah disinggung bahwa faktor yang mempengaruhi terjadinya krisis perekonomian serta krisis-krisis lainnya di Asia umumnya dan Asia Tenggara khususnya tidak hanya bersumber dari masalah ekonomis, tetapi juga masalah-masalah lainnya. Hal ini sesuai pula dengan pendapat **Eisenstadt** (dalam **Evers**, 1972 : 15) yang mengatakan bahwa kondisi-kondisi yang memiliki pengaruh besar terhadap tatanan pembangunan politik dan sosial pasca tradisional adalah struktur dari proses sejarah yang meliputi aspek-aspek ekonomi, politik, atau organisasi sosial dan stratifikasi masyarakatnya.

Sementara itu meminjam analisis **Kantaprawira** (1988 : 37-38), terjadinya berbagai hal dalam suatu negara dapat dikembalikan kepada budaya politik (*political cultures*) dari negara yang bersangkutan. Budaya-budaya politik yang dimaksud disini antara lain berupa konfigurasi subkultur, budaya politik parokial kaula dan partisipan, primordialisme dan paternalisme patrimonial, serta dilema interaksi tentang introduksi modernisasi.

Atas dasar analisis kedua pakar tersebut, maka dapat dijelaskan beberapa faktor non ekonomis penyebab terjadinya krisis moneter di Asia dan atau Asia Tenggara sebagai berikut :

1. Masalah Budaya dan Perilaku Masyarakat.

Sebagaimana disebut diatas, budaya politik masyarakat Indonesia sebagian masih bersifat *parokial* atau terbatas pada wilayah/ lingkup yang sempit. Dalam keadaan seperti ini, masyarakat cenderung tidak menaruh minat terhadap obyek politik yang luas. Padahal latar belakang terjadinya krisis moneter melingkupi wilayah yang tidak terbatas serta menyangkut seluruh aspek kehidupan. Dengan demikian, sikap masyarakat yang cenderung “tidak ingin tahu” dan tidak menyukai spesialisasi, jelas tidak sesuai dengan era modern seperti sekarang.

Budaya yang demikian juga makin diperparah oleh *budaya politik kaula*, dimana masyarakat lebih banyak menerima setiap sistem yang ditempuh oleh pemerintah dengan sikap patuh (*obedient*), loyal dan mengikuti segala instruksi dari para pemimpin politiknya.

Ketika *budaya politik partisipan* mulai lebih diperkenalkan, ternyata arahnya bukan kepada munculnya mekanisme pengawasan secara demokratis, tetapi justru kepada pemenuhan kepentingan pribadi. Sebagai contoh, jenis-jenis usaha restoran atau hotel telah banyak menerapkan standar pembayarannya dengan dollar. Selain itu, saat nilai kurs rupiah anjlok dibanding dollar AS, masyarakat beramai-ramai membeli dollar, dan bukan sebaliknya. Baru setelah krisis dirasakan sangat parah, pemerintah menggalakkan *Gerakan Cinta Rupiah*.

Bahkan yang lebih memprihatinkan adalah bahwa kelangkaan dollar di pasar uang ternyata tidak disebabkan oleh ulah para spekulan saja, tetapi justru oleh para pejabat tinggi negara dan pengusaha nasional. Disinilah sebenarnya tindakan tersebut disesalkan, karena baru memberikan contoh konkrit kepada masyarakat setelah berbagai upaya yang dilakukan terdahulu tidak membawa hasil.

Masih terkait dengan permasalahan budaya ini adalah rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat baik terhadap pemerintah, terhadap mata uang nasional maupun terhadap sistem ekonomi nasional. Dari contoh yang telah diberikan diatas terlihat bahwa *kepercayaan terhadap rupiah sangat rendah*,

padahal mata uang suatu negara ini kedudukannya tidak jauh berbeda dengan bahasa, bendera maupun lambang negara yang bersangkutan sebagai alat pemersatu bangsa. *Ketidakpercayaan terhadap sistem perekonomian* dapat dilihat dari keengganan sementara pihak untuk menyimpan uangnya di bank pemerintah maupun bank swasta nasional, dan lebih memilih di luar negeri dengan alasan keamanan. Adapun *rendahnya kepercayaan terhadap pemerintah* terlihat dari kurang adanya dukungan masyarakat terhadap berbagai himbuan dan kebijaksanaan pemerintah, serta lebih mengandalkan pada mekanisme pasar yang terbukti telah mengalami kegagalan (*market failure*).

2. Masalah Sistem atau Struktur Politik

Sebagaimana diketahui bersama, kepemimpinan nasional di Indonesia sudah berlangsung cukup lama (lebih dari 30 tahun), sementara kondisi di negara-negara lain justru merupakan kebalikannya, yakni terjadinya pergantian kepemimpinan nasional yang terlalu sering. Korea dan Thailand merupakan contoh dari bagaimana pergantian pimpinan negara dapat dengan mudah terjadi hanya dengan dorongan dari aksi protes atau demonstrasi baik di kalangan mahasiswa maupun buruh.

Keadaan yang dialami oleh Indonesia maupun oleh Korea dan Thailand, sama-sama tidak menguntungkan. Kasus Indonesia dapat dikategorikan pada posisi transisi antara rejim kepemimpinan lama kepada kemungkinan munculnya rejim yang baru. Sementara kasus Korea dan Thailand, jelas sekali menyebabkan timbulnya gangguan stabilitas secara sporadis. Padahal kita sadari bahwa stabilitas politik merupakan prasyarat bagi manunya pembangunan ekonomi dan sektor-sektor lainnya.

Dalam kondisi politik yang seperti itu, maka wajar jika pengusaha-pengusaha dalam negeri mulai melirik untuk mengembangkan sayapnya keluar (*capital flight*), sementara pengusaha asing enggan mengembangkan usahanya di dalam negeri. Disamping itu, situasi dan struktur politik yang tidak menentu akan banyak menimbulkan spekulasi di kalangan pengusaha maupun segmen masyarakat lainnya mengenai konsistensi kebijakan dan haluan negara dimasa yang akan datang. Terlebih lagi bagi bangsa Indonesia yang sebentar lagi akan menyelenggarakan Sidang Umum MPR pada bulan Maret 1998 ini. Oleh karena itu, dapat

diperkirakan bahwa situasi keuangan dan moneter akan stabil kembali setelah struktur politik tertata secara mantap dan jelas.

Khususnya untuk kasus Indonesia, kondisi politik ini semakin tidak menguntungkan dengan adanya faktor kesehatan Kepala Negara yang belakangan ini agak terganggu. Artinya, berita-berita yang kadang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya mengenai keadaan pribadi Presiden, dengan mudah akan memicu merosotnya nilai tukar rupiah. Akan tetapi sebaliknya, dengan adanya dukungan negara maju kepada Indonesia sebagaimana yang ditunjukkan oleh telepon Presiden Clinton kepada Presiden Soeharto, gejolak rupiah sedikit banyak dapat berkurang. Semuanya ini menunjukkan bahwa situasi ekonomi sangat sensitif atau rentan terhadap situasi politik suatu negara dan keterkaitannya dengan situasi politik negara lain.

3. Masalah Hubungan Luar Negeri

Seperti kita saksikan beberapa tahun yang lalu, Indonesia menolak bantuan Belanda melalui IGGI karena menolak bantuan tersebut dikaitkan dengan pelaksanaan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Kasus serupa kemudian muncul ketika Indonesia membatalkan secara sepihak perjanjian jual beli pesawat tempur F-16 dengan AS, juga dengan alasan hak asasi manusia.

Tentu saja setiap negara memiliki kedaulatan dan kewenangan untuk menentukan nasib sendiri. Namun sesuai dengan ciri utama globalisasi – yaitu *semakin terhubungkan (interconnected) masyarakat dunia satu sama lainnya dalam berbagai aspek kehidupan mereka baik dalam hal budaya, ekonomi, politik, teknologi, maupun lingkungan (Lodge, 1995)* – maka kebijakan internal suatu negara tidak dapat dipisahkan begitu saja dari kepentingan dan keterkaitannya dengan negara lain. Atau dengan kata lain, negara kita suatu saat akan dapat diperlakukan serupa oleh negara lain. Dan ini merupakan kerugian yang tidak kecil, dimana kita sedang membutuhkan bantuan mereka untuk mengatasi krisis tertentu yang sedang dihadapi.

Untuk mengatasi adanya ketidakcocokan atau kesalahpahaman dalam hubungan antar negara, peranan diplomasi perlu lebih dipertajam, dengan tetap mendasarkan pada prinsip tidak saling mencampuri, menghormati kedaulatan negara lain, serta saling menguntungkan. Dengan kata lain, arogansi dalam hubungan internasional hendaknya tidak dipertahankan lagi.

4. Masalah Sosial Kependudukan

Permasalahan sosial yang lahir dari dampak pembangunan (*development pain*) seperti pengangguran, kerusuhan yang berbasis SARA maupun kriminalitas, sering ditemui dinegara-negara sedang membangun. Kondisi-kondisi itu menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi yang dilaksanakan beserta hasil-hasil yang dicapainya, belum berhasil menciptakan pembangunan karakter (*character building*) dan pembangunan bangsa (*nation building*).

Dalam konteks ini, kesenjangan sosial maupun kesenjangan regional masih sangat kelihatan, sehingga kecemburuan antar stratifikasi sosial serta antar daerah dengan sendirinya masih sering muncul ke permukaan. Untuk itu, pemerintah dituntut untuk bersikap adil dan proporsional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa membedakan status sosial ekonomi mereka. Atau dengan kata lain, kebijakan memberikan monopoli maupun hak-hak istimewa (*privilege*) kepada golongan penduduk tertentu, sangat tidak bisa diterima ; bukan saja karena alasan keadilan dan pemerataan, tetapi juga sangat tidak mendidik bagi upaya menciptakan kemandirian bangsa di mata internasional.

Catatan Penutup

Kajian terhadap suatu kasus yang terjadi pada suatu komunitas tertentu (lingkup masyarakat terkecil sampai dengan yang terbesar) biasanya selalu bersifat multi dimensional. Untuk itu, teknik pendekatan dan strategi pemecahan masalahnyapun perlu dilakukan secara multi disipliner maupun lintas sektoral. Sebagai contoh, terjadinya krisis perekonomian yang melanda Asia pada umumnya dan Asia Tenggara pada khususnya, tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor yang mempengaruhinya. Namun pendalaman terhadap masing-masing faktor perlu dilakukan secara spesifik, sehingga dapat diketahui kelebihan dan kelemahan masing-masing faktor, untuk kemudian ditemukan upaya terbaik mengatasi krisis.

Disamping itu, tidak bisa diabaikan juga adalah suasana kebersamaan dan persatuan antar seluruh lapisan masyarakat dalam menyikapi kondisi yang kurang menguntungkan tersebut. Artinya, perlu ditumbuhkan kesadaran bahwa kita hidup di tengah-tengah masyarakat komunitas yang integralistik. Tanpa

adanya kebersamaan ini niscaya krisis moneter akan berlangsung lama dan sulit diatasi.

* * *

DAFTAR PUSTAKA

Evers, Hans Dieter (ed.), *Modernization in South East Asia*, Singapore : Institute of Southeast Asian Studies, 1972

Kantaprawira, Rusadi, *Sistem Politik Indonesia : Suatu Model Pengantar*, Bandung : Sinar Baru, Cet. Kelima, 1988

Lodge, George C., *Managing Globalization in The Age of Interdependence*, Kuala Lumpur : Golden Books Center, 1995

Wong, John, *Ekonomi ASEAN : Prospek Pembangunan Dasawarsa 1980-an*, Jakarta : Bina Aksara, 1982.